

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia dimana berbagai permasalahan hanya dapat dipisahkan kecuali dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain manfaat bagi kehidupan manusia di satu sisi perubahan tersebut juga telah membawa manusia ke dalam era persaingan global yang semakin ketat. Agar mampu berperan dalam persaingan global, maka perlu mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien dalam proses pembangunan, kalau tidak ingin kalah bersaing dalam menjalani era globalisasi tersebut. Berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia, pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri.

Reformasi bidang politik di Indonesia pada penghujung abad ke 20 M telah membawa perubahan besar pada kebijakan pengembangan sektor pendidikan, yang secara umum bertumpu pada dua paradigma baru yaitu otonomisasi dan demokratisasi. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah telah meletakkan sektor pendidikan sebagai salah satu yang di otonomisasikan bersama sektor-sektor pembangunan yang berbasis kedaerahan lainnya seperti kehutanan, pertanian, koperasi dan pariwisata.¹ Otonomisasi sektor pendidikan kemudian didorong pada sekolah, agar kepala sekolah dan guru

¹ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah* (Indonesia, 2015).

memiliki tanggung jawab besar dalam peningkatan kualitas proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas hasil belajar. Baik dan buruknya kualitas hasil belajar siswa menjadi tanggung jawab guru dan kepala sekolah. Kepala sekolah menjadi kunci utama mewujudkan perbaikan kinerja manajemen sekolah.² Pemerintah hanya memfasilitasi berbagai aktivitas pendidikan, baik sarana prasarana, ketenagaan, maupun berbagai program pembelajaran yang direncanakan sekolah.

Bersamaan dengan itu, pemerintah juga mengeluarkan undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, sebagai pengganti undang-undang nomor 2 tahun 1989 yang membawa perspektif baru yang amat revolusioner dalam konteks perbaikan sektor pendidikan yang mendorong pendidikan sebagai urusan publik dan urusan masyarakat secara umum dengan mengurangi otoritas pemerintah baik dalam kebijakan kurikulum, manajemen maupun berbagai kebijakan pengembangan institusi pendidikan itu sendiri.³ Salah satu isu penting dalam undang-undang tersebut adalah pelibatan masyarakat dalam pengembangan sektor pendidikan, sebagaimana ditegaskan pada pasal 9 bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Pasal ini merupakan kelanjutan dari pernyataan pada pasal 4 ayat 1 bahwa pendidikan di Indonesia diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan. Demokratisasi pendidikan merupakan implikasi dari dan sejalan dengan kebijakan mendorong pengelolaan sektor pendidikan pada daerah, yang implementasinya di tingkat sekolah, baik rencana pengembangan sarana, dan alat ketenagaan, kurikulum serta berbagai program pembinaan siswa, semua diserahkan pada sekolah untuk merancanginya serta mendiskusikannya dengan mitra horizontalnya dari komite sekolah.

² Danim Sudarwan, *Otonomi Manajemen Sekolah* (Bandung: Alfabeta, 2010), 37.

³ Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 12.

Implementasinya pemerintah mengeluarkan PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Dalam penjelasan PP tersebut disebutkan bahwa visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Pemberian otonomi pendidikan yang luas pada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di sekolah agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif guna mendukung kemajuan dan sistem yang ada di sekolah. Dalam kerangka inilah, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) tampil sebagai alternatif paradigma baru manajemen pendidikan yang ditawarkan.⁴ MPMBS merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah.

Model MPMBS ini adalah suatu ide dimana kekuasaan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan diletakkan pada tempat yang paling dekat dengan proses belajar mengajar, yakni sekolah. Konsep ini didasarkan pada “*Self Determination Theory*” yang menyatakan bahwa apabila seseorang atau kelompok memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan sendiri, maka orang atau kelompok tersebut akan memiliki tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan apa yang telah diputuskan tersebut.⁵ Dalam pelaksanaan MPMBS

⁴ E Mulyasa, *Metode Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi Dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 11.

⁵ S Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2000), 79.

tersirat adanya tugas sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan menggunakan strategi yang lebih memberdayakan semua potensi sekolah secara optimal.

Berlakunya desentralisasi pendidikan berbasis manajemen sekolah juga memberikan dampak yang besar pada pembiayaan pendidikan, biaya pendidikan melambung tinggi sesuai kebijakan sekolah dan timbul suatu fenomena dunia pendidikan sekolah unggulan dengan biaya pendidikan yang mahal. Hal ini yang menimbulkan kamufase yang terjadi di masyarakat dengan biaya mahal apakah diimbangi dengan kualitas pendidikan yang terjamin, oleh karena itu desentralisasi sangat erat dengan manajemen pembiayaan. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Pembiayaan ini perlukan untuk program sekolah, pengadaan sarana dan prasarana, gaji guru, gaji pegawai, keperluan-keperluan untuk menunjang tercapainya visi dan misi sekolah. Oleh karena itu sekolah harus serius dalam mengelola program manajemen berbasis sekolah terutama dalam komponen manajemen pembiayaan pendidikan dan yang paling utama adalah penentuan biaya pendidikan.

Manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan merupakan konsepsi berpikir secara global, umum dan menyeluruh sebagai wujud implementasi dari berbagai regulasi, kebijakan, aturan, dan program berkenaan dengan Manajemen Pembiayaan Pendidikan, anggaran pendidikan, pendanaan pendidikan, pembiayaan pendidikan dan berbagai sumber daya pendidikan lainnya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi layanan pendidikan. Sumber daya pendidikan yang dimaksud dan dipandang sebagai instrumen produksi atau proses yang menentukan terselenggaranya atau tidak proses pendidikan adalah faktor pembiayaan. Pendidikan membutuhkan biaya yang banyak karena pendidikan yang berkualitas itu mahal. Oleh karena itu, keuangan atau pembiayaan pendidikan menjadi faktor esensial.⁶

⁶ Rohiat, *Manajemen Sekolah: Teori Dasar Dan Praktik*, Bandung: Refika Aditama (Bandung: Refika Aditama, 2010),27.

Penanggung jawab Manajemen Pembiayaan Pendidikan adalah kepala sekolah. Guru diharapkan dapat merencanakan pembiayaan kegiatan belajar mengajar dengan baik. Kebutuhan untuk pembelajaran yang baik tentunya memerlukan pembiayaan yang memadai.

Manajemen Pembiayaan Pendidikan merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah.⁷ Oleh karena itu manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan menjadi urgen posisinya untuk diaplikasikan, karena secara normatif dan sosiologis entitas sekolah bukanlah lembaga yang bersifat profit, sehingga memberikan tanggung jawab bagi masyarakat dan setiap orang tua siswa, dimana setiap penerimaan lembaga pendidikan harus digunakan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan yang profesional. Hal ini dilandasi;

- a. Adanya tuntutan untuk mampu mengelola penggunaan dana secara transparan dan akuntabel,
- b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya
- c. Meminimalkan penyalahgunaan dana yang dihimpun
- d. Kreatif menggali sumber-sumber pendanaan
- e. Menempatkan bendahara yang kompeten dan professional.⁸

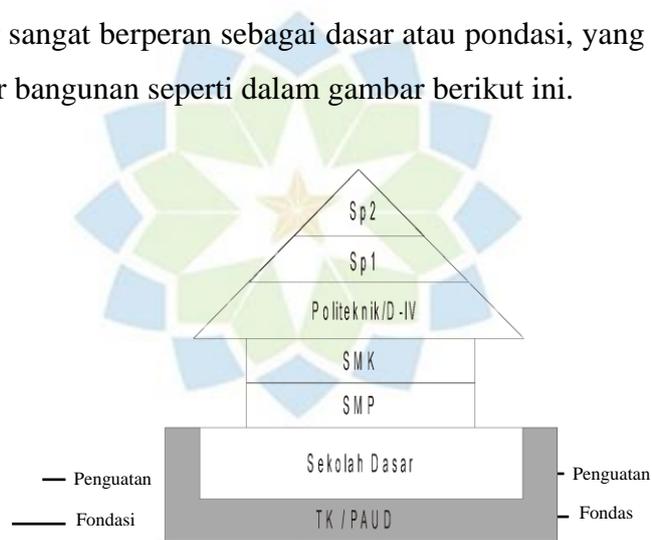
Khusus mengenai sekolah dasar yang dijadikan sebagai tempat penelitian, hal ini mengingat peran pendidikan dasar khususnya SD sebagai bentuk satuan pendidikan dasar, dimana pada tahap inilah keberhasilan murid ditentukan, anak memperoleh dasar-dasar pendidikan yang penting untuk pendidikan selanjutnya, dan diharapkan tahap ini akan membantu mengarahkan pendidikan lebih lanjut termasuk keberhasilan pendidikan di tingkat SD akan sangat membantu satuan-

⁷ Rusdiana and Wardija, *Manajemen Keuangan Sekolah Konsep, Prinsip Dan Aplikasinya Di Sekolah/Madrasah* (Bandung: Arsad Press, 2013), .2.

⁸ Arwildayanto, *Manajemen Pembiayaan Dan Keuangan Pendidikan* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2017), .4.

satuan pendidikan berikutnya. Bahkan menurut Suderadjat⁹, peningkatan mutu sistem pendidikan nasional hanya dapat dilakukan dengan dua cara.

- 1) Melalui pendekatan *system development*. Maksudnya jenjang dan sistem pendidikan dalam sistem pendidikan merupakan komponen yang saling terhubung, saling tergantung, dalam usaha mencapai tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan tidak dapat diupayakan melalui pendidikan tinggi, atau pendidikan menengah secara parsial, namun pendidikan harus dilakukan dengan pendekatan, dimana TK/PAUD dan Sekolah Dasar sangat berperan sebagai dasar atau pondasi, yang dianalogikan seperti struktur bangunan seperti dalam gambar berikut ini.



Gambar 1. 1 Jenjang Pendidikan (Sumber : Sudradjat)

Melalui penguatan lembaga pendidikan sebagai sub sistem pendidikan nasional. Penguatan ini harus diselaraskan dengan peran dan fungsi lembaga pendidikan sebagai suatu komponen dalam sistem pendidikan nasional dengan tetap memperhatikan strategi dan tujuan pendidikan nasional. Perkembangan sekolah dasar berbasis spirit keagamaan baik di tanah air maupun di negara-negara maju merupakan hal yang cukup fenomenal. Pada saat reformasi pendidikan dibuka, tercatat lebih dari 80% sekolah-sekolah swasta yang baru dibuka di Indonesia adalah sekolah berbasis keagamaan, baik itu di kompleks-kompleks perumahan mewah maupun di daerah-daerah. Fenomena ini boleh jadi merupakan

⁹ Hari Suderadjat, *Manajemen Kepemimpinan Intrapreneur Pendidikan Menengah Kejuruan* (Bandung: Sekar Gambir Asri, 2011), .3-5.

respon perlawanan masyarakat atau titik balik terhadap “*The McWorld*”, yaitu istilah yang dipopulerkan oleh Benjamin Barber¹⁰ untuk menyebut persekutuan antara paham materialisme dan modernisme yang telah melahirkan paham hedonisme, pornografi, dan konsumerisme.

Kalangan masyarakat muslim Indonesia merespon kondisi ini dengan, diantaranya, mendirikan model sekolah dasar yang disebut Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT). Sejak awal 1990-an, model sekolah dasar Islam terpadu bermunculan. Sekolah Dasar Islam Terpadu pada hakekatnya adalah sekolah yang mengimplementasikan konsep pendidikan Islam berlandaskan Al-Quran dan As sunnah. Dalam aplikasinya Sekolah Dasar Islam Terpadu diartikan sebagai sekolah yang menerapkan pendekatan penyelenggaraannya dengan memadukan pendidikan umum dan pendidikan agama menjadi suatu jalinan kurikulum. Sekolah Dasar Islam Terpadu juga menekankan keterpaduan dalam metode pembelajaran sehingga dapat mengoptimalkan ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Sekolah Dasar Islam Terpadu juga memadukan pendidikan aqliyah, ruhiyah dan jasadiyah¹¹. Dalam penyelenggaraannya memadukan keterlibatan dan partisipasi aktif lingkungan belajar yaitu sekolah, rumah dan masyarakat.

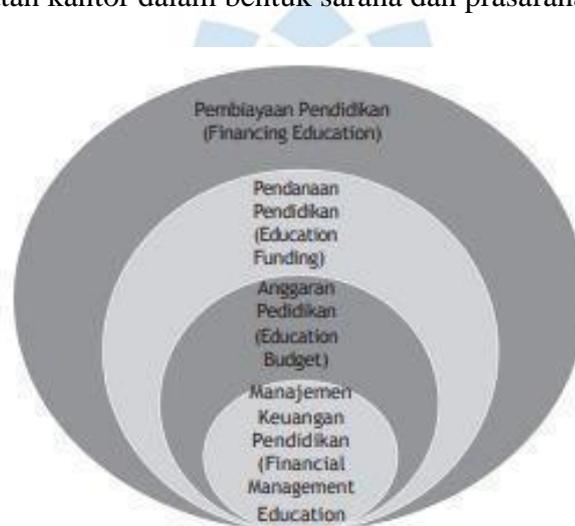
Sebagai sekolah yang didirikan oleh swasta maka tantangan penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu cukup berat. Bagaimana mengelola bisa menjawab kebutuhan sekolahnya dengan keunggulan mutu dan layanan yang efektif dan efisien. Dalam situasi keterbatasan dana pendidikan yang tersedia, sekolah juga dihantui oleh terjadinya inefisiensi dalam mengalokasikannya. Inefisiensi itu terjadi karena proporsi biaya yang dialokasikan secara langsung untuk menunjang proses belajar mengajar dan peningkatan sumber daya manusia di tingkat sekolah sangat kecil, padahal peningkatan sumber daya manusia akan

¹⁰ Benjamin Barber, “Jihad vs. McWorld: How Globalism and Tribalism Are Reshaping the World,” *International Journal Of Social Science And Humanity* (1995).

¹¹ Tim Penyusun JSIT Indonesia, *Standar Mutu Sekolah Islam Terpadu* (Jakarta: Jaringan Sekolah Islam Terpadu, 2010), 4.

meningkatkan kontribusi dalam organisasi untuk mencapai produktivitas organisasi yang bersangkutan.¹²

Sementara itu menurut berbagai hasil kajian ternyata kedua hal tersebut yang paling besar memberikan kontribusi secara nyata dalam upaya peningkatan mutu Pendidikan.¹³ Ini terjadi karena sistem alokasi pendanaan Pendidikan disamakan dengan sistem alokasi lembaga perkantoran¹⁴, Sehingga alokasi dana untuk mendukung proses belajar mengajar disamakan dengan alokasi untuk mendukung kegiatan kantor dalam bentuk sarana dan prasarana.



Gambar 1. 2 Konsep Manajemen Pembiayaan (Sumber : Arwildayanto)

Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Insan Rahayu Kabupaten Bandung merupakan sekolah yang berada dibawah naungan Al Mudrik Sava Foundation, berlokasi di Jalan Rancaekek Majalaya KM 05 Kabupaten Bandung. SK Pendirian Sekolah dari Disdikbud Kabupaten Bandung bernomor 421.2/5138-disdikbud pada Tanggal 30 Desember 2016. Walaupun terbilang sekolah swasta yang baru SDIT Insan Rahayu memiliki siswa yang mampu bersaing dengan sekolah negeri lainnya. Banyak tantangan yang dialami oleh sekolah, Kepala Sekolah SDIT Insan Rahayu

¹² Badrudin, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2020), hal.29.

¹³ Edward Sallis, *Total Quality Management in Education-Manajemen Mutu Pendidikan* (Yogyakarta: IRCiSod, 2010), 175.

¹⁴Nurhadi, Muljani A. *Mencari Alternatif Sumber Daya Pendanaan Pendidikan*. Manajemen Pendidikan No. 01/Th 1/Okttober/2005

menuturkan, sekolah masih menitikberatkan keuangannya pada sumbangan wajib orang tua yaitu SPP dan sudah menerima bantuan operasional sekolah (BOS). Pada setiap Penerimaan Peserta Didik Baru, SDIT Insan Rahayu selalu diminati oleh orangtua siswa dan mendapat perhatian dari lingkungan sekitar.



Gambar 1. 3 Gedung Bangunan SDIT Insan Rahayu



Gambar 1. 4 Kondisi Pembelajaran SDIT Insan Rahayu

Gambar 1.3 memperlihatkan kondisi prasarana Gedung SDIT Insan Rahayu sedangkan gambar 1.4 memperlihatkan proses pembelajaran di dalam kelas oleh pendidik yang ada di SDIT Insan Rahayu.

Tergambar bahwa SDIT Insan Rahayu memiliki prasarana yang memadai dan layak. Sebagai sekolah baru SDIT Insan Rahayu harus memperkuat kualitas

sumberdaya pendidik dan tenaga kependidikan, serta memenuhi berbagai tuntutan orang tua dan masyarakat.

Tabel 1. 1 Jumlah Siswa Berdasarkan Penghasilan Orangtua

Penghasilan	L	P	Total	%
Tidak di isi	4	3	7	1,6
Kurang dari Rp. 500,000	0	2	2	2
Rp. 500,000 - Rp. 999,999	8	8	16	16
Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999	41	47	88	20
Rp. 2,000,000 - Rp. 4,999,999	151	140	291	65
Rp. 5,000,000 - Rp. 20,000,000	21	19	40	9
Lebih dari Rp. 20,000,000	1	1	2	0,4
Total	226	220	446	100

Berdasarkan tabel 1.2 dapat disampaikan bahwa mayoritas siswa yaitu 65% memiliki orang tua yang berpenghasilan antara Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga Rp. 4.999.999,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Hanya 9,4% siswa dengan orang tua yang berpenghasilan lebih dari 5 (lima) juta rupiah, sedangkan selebihnya adalah siswa dengan orang tua yang berpenghasilan kurang dari 2 (dua) juta rupiah yaitu sebanyak 39,6%.

Pembiayaan pendidikan yang dikeluarkan oleh orang tua merupakan salah satu Input sumber daya yang diperoleh SDIT Insan Rahayu dalam melakukan manajemen pendidikan. Tentunya hal ini merupakan hal penting yang berpengaruh dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Pendidik dan Tenaga kependidikan. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan merupakan salah satu *direct cost* yang dikeluarkan oleh Lembaga. Adapun manajemen tersebut harus menjadi kajian penting sebagai pengembangan ilmu dalam manajemen pembiayaan pendidikan.

Sesuai dengan pemetaan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018, bahwa dana untuk pendidik dan tenaga kependidikan telah dialokasikan sebanyak 25,1% dari APBN atau sekitar 9,99

triliun. Adapun peningkatan kesejahteraan dapat dikatakan belum sejalan dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yaitu pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini didasarkan melalui penelitian yang dilakukan oleh *Research In Improving System of Education (RISE)* Indonesia, bahwa hanya sedikit program yang sejalan dengan perbaikan kualitas pendidik. Program yang ditujukan untuk perbaikan kemampuan mengajar dan pengetahuan guru yaitu sekitar 9% saja.

Adapun fenomena dilapangan, bahwa SDIT Insan Rahayu saat ini baru memasuki tahun ke-6 dan baru meluluskan 1 angkatan di tahun 2022. Meskipun pendiriannya terhitung baru namun perkembangan dan sambutan masyarakat sekitar semakin meningkat untuk memasukkan anak mereka ke SDIT Insan Rahayu, dilihat dari jumlah peserta didik yang semakin bertambah. Sehingga jika ada tambahan kepercayaan masyarakat pada sekolah untuk menitipkan anak-anaknya, tentu akan berimplikasi pada meningkatnya biaya yang akan dikelola oleh sekolah. Dengan demikian agar peserta didik tetap diperhatikan, maka sumber daya pendidik maupun tenaga kependidikan juga perlu di tingkatkan.

Oleh karena itu, berdasarkan data yang telah diungkapkan maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (Penelitian di SDIT Insan Rahayu Kabupaten Bandung)”. Penelitian ini dilakukan dalam upaya menganalisis untuk pertama kalinya mengenai pengelolaan pembiayaan pada tingkat sekolah dasar dalam upaya meningkatkan kualitas para tenaga pendidik dan kependidikannya.

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan agar penelitian dilaksanakan secara fokus maka penelitian ini berkaitan dengan Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam peningkatan Kualitas Sumber Daya tenaga Pendidik dan Kependidikan SDIT Insan Rahayu, yaitu mengenai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembiayaan pendidikan di SDIT Insan Rahayu, serta aspek-aspek mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Adapun Rumusan Masalah yang ingin diungkapkan peneliti ialah: **”Bagaimana Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di SDIT Insan Rahayu?”** Dengan pertanyaan turunan sebagai berikut:

- a. Bagaimana perencanaan pembiayaan pendidikan di SDIT Insan Rahayu?
- b. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan pendidikan di SDIT Insan Rahayu?
- c. Bagaimana pengawasan pembiayaan pendidikan di SDIT Insan Rahayu?
- d. Bagaimana manajemen pembiayaan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di SDIT Insan Rahayu?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengungkap, mendeskripsikan, mengidentifikasi, dan menganalisis data-data mengenai Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di SDIT Insan Rahayu, sehingga dapat memberikan tambahan referensi mengenai manajemen pembiayaan pada tingkat sekolah dasar.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengungkap dan memperoleh gambaran perencanaan pembiayaan pendidikan di SDIT Insan Rahayu.
- b. Mengungkap dan memperoleh gambaran pelaksanaan pembiayaan pendidikan di SDIT Insan Rahayu
- c. Mengungkap dan memperoleh gambaran pengawasan pembiayaan pendidikan di SDIT Insan Rahayu.
- d. Mengungkap dan memperoleh gambaran mengenai manajemen pembiayaan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di SDIT Insan Rahayu.

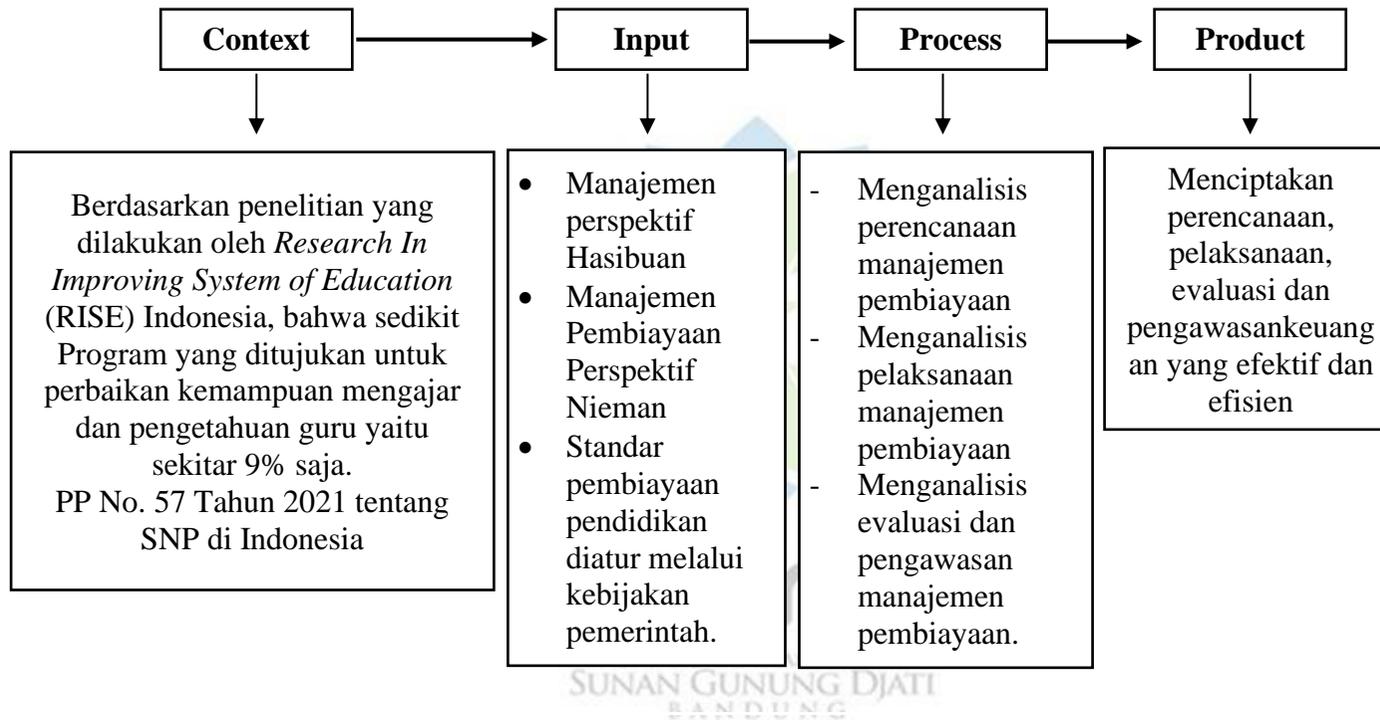
D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian lapangan ini memberikan wawasan mengenai pola mekanisme pembiayaan pendidikan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diterapkan di sekolah serta memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam bidang pembiayaan.
2. Secara praktis dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, dapat menambah wawasan mengenai pola mekanisme pembiayaan pendidikan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

E. Kerangka Pemikiran

Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah adalah strategi untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan dengan mendelegasikan pengambilan keputusan penting dari Pusat ke tingkat sekolah. Manajemen berbasis sekolah memberikan kesempatan pengendalian lebih besar kepada kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua atas proses pendidikan di lembaga pendidikannya masing-masing. Adapun manajemen pembiayaan adalah sebagai suatu aktivitas yang dilakukan untuk menentukan berjalannya kegiatan pendidikan sehingga tentunya dalam pelaksanaan peningkatan mutu, selalu terkait dengan manajemen pembiayaan sebagai sumber pendanaan, pemanfaatan, pelaporan, pemeriksaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban yang dirangkum dalam tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Dalam realitanya, tentu manage pembiayaan tidak serta merta selalu berjalan sesuai rencana. Kepala Sekolah sebagai penentu peningkatan mutu dan pengambil keputusan harus mengetahui faktor pendukung serta faktor penghambat dalam pelaksanaan manajemen pembiayaan. Manajemen pembiayaan dalam pengelolaannya tentunya harus juga berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu peningkatan kualitas pendidikan hanya dapat diraih dengan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikannya yang berhubungan langsung dengan para siswa selaku penerima jasa pendidikan.



Gambar 1. 5 Kerangka Berpikir Model CIPP

Manajemen menurut Malayu S.P Hasibuan mengemukakan bahwa "Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.". Selanjutnya, menurut Niemann (1995) Manajemen Pembiayaan adalah pelaksanaan oleh seseorang dalam posisi otoritas dari mereka (tugas yang diatur) terhubung dengan tujuan tunggal untuk mencapai pendidikan yang efektif. Selain itu mengacu juga pada kebijakan pemerintah terdapat dalam PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang didalamnya mengatur Standar Pembiayaan Pendidikan.

Pada kerangka pemikiran diatas, peneliti menjabarkan *Contexts* sebagai fenomena yang terjadi, seperti halnya diatas bahwa hasil penelitian *Research in Improving System of Education* hanya menyalurkan sekitar 9% untuk program peningkatan kompetensi guru, selain itu rupanya agar tercipta system pendidikan yang bermutu pemerintah juga menetapkan kebijakan tentang Standar Nasional Pendidikan yakni PP No. 57 Tahun 2021 yang mana didalamnya memaparkan mengenai standarisasi pembiayaan pendidikan.

Kemudian, pada gambar *Input* diatas, yakni beberapa teori yang bisa dijadikan bahan kajian dalam penelitian ini mulai dari adanya *statement* mengenai manajemen secara umum, kemudian manajemen pembiayaan selain itu juga standar pembiayaan pendidikan yang tetap di lihat sebagai bahan masukan dalam penelitian ini agar dapat dikembangkan. Adapun *Proces* dalam gambar diatas menunjukkan bahwa masukan sebelumnya mengenai manajemen pembiayaan dapat dianalisis dengan beberapa komponen untuk penelitian ini, yakni meliputi adanya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Sehingga sebagai *Product* dalam penelitian ini diharapkan sekolah dapat menciptakan manajemen pembiayaan yang efektif dan efisien.

Model CIPP ini merupakan model yang dikembangkan oleh sebuah tim yang diketuai oleh Stufflebeam. Sehingga sesuai dengan namanya, model ini memiliki empat komponen yang bisa dijadikan landasan penelitian. Dari mulai *context* untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang berkaitan dengan manajemen pembiayaan

dalam pendidikan, kemudian *Input* memberikan pertimbangan terhadap keberhasilan manajemen pembiayaan pendidikan, *Process* merupakan inovasi yang dapat dilakukan dalam manajemen pembiayaan, terakhir *Product* yang bertujuan untuk menentukan keberhasilan manajemen pembiayaan pendidikan¹⁵.

Adapun alasan menggunakan model CIPP ini antara lain, peneliti beranggapan bahwa dalam kegiatan manajemen perlu di tinjau secara sistematis, sehingga dapat berimplikasi pada tingkat sebuah keberhasilan dan pencapaian sebuah lembaga pendidikan. Dalam hal ini berarti diharapkan dapat berhasil menjalankan manajemen pembiayaan pendidikan dalam peningkatan kualitas sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan dari hasil meninjau *context, input, process* hingga *product*.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang dianggap serupa dengan penelitian yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Strategi Manajemen Keuangan Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Islam Druju Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang (2018)

Penelitian Tesis ini dilakukan oleh Indra Saputra Wijaya pada Program Magister Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2018. Penelitian ini mengungkapkan mengenai strategi perencanaan keuangan sekolah Islam dalam peningkatan mutu pendidikan di SMP Islam Druju Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, serta proses penggalan sumber-sumber dan pengelolaan dana keuangan sekolah yang terdapat di SMP Islam Druju Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, dan memaparkan mengenai akuntabilitas keuangan sekolah di SMP Islam Druju Sumbermanjing

¹⁵ Elis Ratna Wulan dan Rusdiana. 2014. *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: Pustaka Setia. 115

Wetan Kabupaten Malang. Kekurangan pada penelitian ini adalah belum terlihat sejauh mana dan strategi apa yang digunakan oleh Kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, dan hanya sebatas pengelolaan dana melalui RAPBS saja.¹⁶

2. Manajemen Pembiayaan Pendidikan dan Dampaknya terhadap Mutu Pendidikan, Penelitian di Madrasah Aliyah Multiteknik Asih Putera Kota Cimahi Jawa Barat (2017)

Penelitian Tesis dilakukan oleh Ahmad Fauzy Abdul Basith Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, pada tahun 2017 yang memaparkan mengenai manajemen pembiayaan pendidikan. Kelebihan dalam penelitian ini adalah sudah tergambar mengenai program-program yang direncanakan dalam kegiatan pembiayaan pendidikan yaitu, Pengembangan Kompetensi Lulusan, Pengorganisasian pembiayaan Kepala madrasah sebagai penanggungjawab atas pelaksanaan pembiayaan pendidikan yang berada di bawah kendali yayasan dan Pelaksanaan pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah Multiteknik Asih Putera sudah berjalan sesuai dengan prosedur atau standarisasi yang berlaku yaitu mengacu pada RAPBS dan disebutkan pula mengenai dampak atau pengaruh positif manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu pendidikan sebesar 18,9%.¹⁷

3. Manajemen Keuangan (Studi Kualitatif tentang Penggunaan Keuangan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Al-Baroroh Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut (2015)

Penelitian Tesis dilakukan oleh Ahmad Rizal pada jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Fakultas Tarbiyah UIN Bandung pada tahun 2015.

¹⁶ Indra Saputra Wijaya. *Strategi Manajemen Keuangan Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Islam Druju Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang*. Tesis. UIN Malang. 2018

¹⁷ Ahmad Fauzy Abdul Basith. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan dan Dampaknya terhadap Mutu Pendidikan, Penelitian di Madrasah Aliyah Multiteknik Asih Putera Kota Cimahi Jawa Barat*. Tesis. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2017

Penelitian ini membahas mengenai beberapa program dalam meningkatkan mutu pendidikan. Peningkatan mutu tersebut berupa kegiatan ekstrakurikuler, pengalokasian dana untuk guru melalui peningkatan profesionalisme guru berupa gaji dan tunjangan, pengalokasian dana untuk sarana dan prasarana yaitu dengan cara penambahan fasilitas, perbaikan sarana dan pemeliharaan.¹⁸

4. Manajemen Pembiayaan Pendidikan (2021)

Penelitian jurnal ini dilakukan oleh Opan Arifudin, Nur Rahmi Sonia, I. Putu Ayub Darmawan dkk dilatarbelakangi bahwa manusia membutuhkan manajemen sebagai jalan atau alat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik termasuk dalam mengelola lembaga pendidikan dalam sebuah organisasi. Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam keberlangsungan serta mutu dari lembaga pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, komponen keuangan dan pembiayaan adalah salah satu indikator lembaga pendidikan mencapai tujuan pendidikan. Tentunya hal ini akan berjalan dengan baik jika menggunakan pengelolaan yang baik atau yang bisa dikatakan dengan manajemen. Manajemen pembiayaan pendidikan sebagai sebuah rangkaian aktivitas mengatur keuangan lembaga pendidikan dari proses perencanaan, penatausahaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, pelaporan sampai pada pertanggungjawaban keuangan pendidikan. Oleh sebab itu hadirnya buku Manajemen pembiayaan pendidikan ini hadir untuk menjadi sebuah solusi dalam menerapkan pembiayaan pendidikan yang terkelola dengan baik. Menjadikan sumber acuan untuk para pemilik lembaga pendidikan dalam menjalankan dan mengelola lembaganya.¹⁹

5. Isu Global Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SD Indonesian Creative School Pekanbaru (2018)

¹⁸ Ahmad Rizal. *Manajemen Keuangan (Studi Kualitatif tentang Penggunaan Keuangan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Al-Baroroh Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut*. Tesis. 2015

¹⁹ Opan Arifudin, Nur Rahmi Sonia, Putu Ayub Darmawan. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Jurnal Widina Bhakti Persada.
<https://repository.penerbitwidina.com/publications/346208/manajemen-pembiayaan-pendidikan>

Penelitian jurnal ini dilakukan oleh Jefril Rahmadoni yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen pembiayaan di salah satu sekolah berbasis internasional dalam pengembangan isu global pendidikan saat ini berguna untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan telah dilakukan dengan baik 1) proses penganggaran pendidikan sesuai prosedur; 2) sumber pembiayaan yang diperoleh dari beberapa sumber dana; 3) faktor penghambat dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan adalah aliran pencairan dana yang cukup lama; 4) pengawasan dan akuntabilitas dalam pembiayaan pendidikan berjalan dengan baik; dan 5) Yayasan, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, bendahara, komite sekolah, guru dan UPTD Pendidikan terlibat dalam proses manajemen keuangan pendidikan di sekolah ini.²⁰

6. Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Masyarakat di MTs Pakis Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas (2020)

Penelitian ini dilakukan oleh Nur Fadhillah yang bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana upaya sekolah dalam meningkatkan pendidikan di daerah yang berada di tepi hutan. Kepedulian masyarakat akan pentingnya pendidikan sangatlah kurang. Faktor biaya menjadi paling utama dalam mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu MTs PAKIS ingin membantu meminimalisir angka putus sekolah di daerah Pelosok. Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan MTs PAKIS sangat membantu masyarakat pelosok dalam meraih pendidikan walaupun dengan fasilitas seadanya. Biaya yang sederhana mampu menumbuhkan rasa simpatik para masyarakat baik dalam maupun luar untuk ikut membantu terlaksananya kegiatan pendidikan. Agar tetap mempunyai semangat belajar, kepala sekolah dan para relawan selalu memberikan motivasi kepada siswa-siswinya supaya tidak putus sekolah walaupun berada di daerah terpencil. Mengang

²⁰ Jefri Rohmadoni. *Isu Global Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SD Indonesian Creative School Pekanbaru*. JMKSP. 2018. <http://dx.doi.org/10.31851/jmksp.v3i2.1855>

awalnya susah meyakinkan dan membuat anak-anak semangat belajar, namun dengan kerjasama para relawan semangat anak-anak perlahan mulai tumbuh dan orang tua mendukung. peneliti keberadaan MTs PAKIS sangat membantu masyarakat pelosok dalam meraih pendidikan walaupun dengan fasilitas seadanya. Biaya yang sederhana mampu menumbuhkan rasa simpatik para masyarakat baik dalam maupun luar untuk ikut membantu terlaksananya kegiatan pendidikan. Agar tetap mempunyai semangat belajar, kepala sekolah dan para relawan selalu memberikan motivasi kepada siswa-siswinya supaya tidak putus sekolah walaupun berada di daerah terpencil. Memang awalnya susah meyakinkan dan membuat anak-anak semangat belajar, namun dengan kerjasama para relawan semangat anak-anak perlahan mulai tumbuh dan orang tua mendukung.²¹

7. Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di SMA Negeri Pascadesentralisasi Pendidikan (2020)

Penelitian ini dilakukan oleh Noor Fazariah Handayani, Nadya Huda bertujuan untuk : (1) mengetahui pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan di SMA Negeri Kota Banjarmasin pascadesentralisasi pendidikan, (2) mengadakan evaluasi pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan di SMA Negeri Kota Banjarmasin pascadesentralisasi pendidikan, dan (3) mengetahui peranan dewan pendidikan dalam manajemen pembiayaan pendidikan di SMA Negeri Kota Banjarmasin pascadesentralisasi pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluatif dengan model CIPP menggunakan observasi, dokumentasi, angket, dan wawancara. Populasi di penelitian ini adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 1, 2, 3, 4, dan 5 Banjarmasin. Sampel di penelitian ini antara lain kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta dewan pendidikan. Penelitian ini memperlihatkan hasil: (1) Pelaksanaan Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMA Negeri Kota Banjarmasin pascadesentralisasi pendidikan dengan pendekatan evaluatif menggunakan Model CIPP menunjukkan bahwa nilai tertinggi terdapat pada variabel proses yaitu 5053 poin dan nilai terendah pada variabel konteks

²¹ Nur Fadhillah., Novan Ardy Wiyani. *Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Masyarakat di MTs Pakis Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. HIJRI. 2020.* <http://dx.doi.org/10.30821/hijri.v9i1.5800>

sebesar 4667 poin; (2) Evaluasi pelaksanaan Manajemen pembiayaan pendidikan di SMA Negeri Kota Banjarmasin pada variabel pelaksanaan anggaran pendidikan, pengalokasian anggaran dana pendidikan, penatausahaan keuangan pendidikan, pertanggungjawaban keuangan pendidikan, dan pengawasan keuangan pendidikan berjalan dengan Efektif/Baik, sedangkan pada variabel sistem penyusunan anggaran pendidikan berjalan Cukup Efektif. Secara umum Manajemen pembiayaan pendidikan berjalan secara Efektif/Baik dengan nilai sebesar 86,12%; (3) Dewan Pendidikan Provinsi telah berperan dan ikut berkontribusi dalam penentuan kebijakan pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan namun belum optimal, sehingga masyarakat kurang menyadari kehadirannya.²²

8. Manajemen Pembiayaan Pendidikan Masa Pandemi Covid-19 di SMK Gazza Wiguna 1 (2021)

Penelitian ini dilakukan Siti Waliyah, Siti Hadiyanti Dini, Ahmad Syarif dilatarbelakangi oleh adanya pandemi Covid 19 yang telah mengubah sistem di dunia khususnya di bidang pendidikan. Pandemi Covid 19 sangat mempengaruhi perekonomian dunia, termasuk di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMKN 1 Gazza Wiguna sebelum pandemi Covid 19 dan pada masa pandemi Covid 19 serta untuk mengetahui dampak pandemi terhadap pembiayaan di SMKN 1 Gazza Wiguna. Penelitian dilakukan di SMK Gazza Wiguna 1 Kab. Bogor. Pengelolaan pembiayaan di SMK Gazza Wiguna meliputi perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan, dengan fokus pada kebutuhan sekolah, guru dan siswa. Pandemi Covid 19 berdampak pada pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMKN 1 Gazza Wiguna yaitu pada perekrutan guru. Dimana saat kondisi normal, SMK Gazza Wiguna 1 mengandalkan SPP untuk honor guru, sedangkan di masa

²² Noor Fazariah Handayani, Nadya Huda. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Sma Negeri Pascadesentralisasi Pendidikan*. JAMP. 2020. <http://dx.doi.org/10.17977/um027v3i42020p332>

pandemi Covid 19 banyak siswa yang kesulitan membayar SPP sehingga SMK Gazza Wiguna 1 melakukan rotasi anggaran agar tetap bisa honorer guru.²³

9. Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Study Kasus MTS Darul Khair Masing, Kec. Batui, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah) (2019)

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) sumber-sumber pembiayaan pendidikan *MTs Darul Khair Masing* Luwuk Banggai; (2) prosedur Manajemen anggaran pendapatan pembiayaan pendidikan *MTs Darul Khair Masing* Luwuk Banggai; (3) penggunaan anggaran belanja pembiayaan pendidikan *MTs Darul Khair Masing* Luwuk Banggai; (4) Pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan *MTs Darul Khair Masing* Luwuk Banggai ; dan (5) Pengawasan pembiayaan pendidikan TK An-Nur Luwuk Rajawali Banggai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu proses data, penyajian data, dan kesimpulan awal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Sumber-sumber pembiayaan pendidikan bersumber dari masyarakat umum, orang tua santri, dan donator tetap, (2) prosedur Manajemen anggaran pendapatan pembiayaan pendidikan sudah dibuat dalam bentuk program pencapaian anggaran pendapatan. Program-program tersebut berdasarkan jangka waktu yang telah ditetapkan, yaitu: Manajemen anggaran pendapatan pembiayaan jangka pendek dan menengah; (3) penggunaan anggaran belanja pembiayaan pendidikan disesuaikan dengan manajemen awal yang telah dibuat dan disepakati bersama dengan berdasarkan panduan atau patokan yang ada; (4) pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan *MTs Darul Khair Masing* Luwuk Banggai sudah sesuai dengan manajemen dan dilaksanakan pada akhir tahun. Pelaku penanggungjawab penggunaan anggaran pembiayaan di tersebut adalah bendahara selaku koordinator keuangan; dan (5) dan pengawasan pembiayaan

²³ Siti Waliyah, Siti Hadiyanti Dini, Ahmad Syarif. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Masa Pandemi Covid-19 di SMK Gazza Wiguna*. Transformasi Manageria. 2021. <https://doi.org/10.47467/manageria.v1i1.272>

pendidikan *MTs Darul Khair Masing* Luwuk Banggai ditugaskan pada tim khusus yang bertugas mengawasi dan mengontrol keuangan. Tim yang terlibat dalam pengawas anggaran adalah masyarakat selaku orang tua.²⁴

10. Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Imam Muslim Serdang Bedagai (2021)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan pembiayaan pendidikan dalam kaitannya dengan upaya peningkatan mutu pendidikan. Penelitian ini difokuskan pada kepala pengelola Madrasah Aliyah Imam Muslim Kabupaten Serdang Bedagai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan studi deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tahapan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji validitas data menggunakan triangulasi dan member crosscheck. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah Imam Muslim Kabupaten Serdang Bedagai memiliki prinsip kekeluargaan, efektif, efisien, produktif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur yang ada yaitu pola hierarki ke atas kepada Ketua Umum. dasar. Dalam meningkatkan mutu pendidikan, kepala sekolah bertugas mengelola pendidikan dengan sebaik-baiknya dan pelaporan rancangan anggaran pembiayaan sekolah diberikan kepada Ketua Yayasan, kepala madrasah juga mempunyai tugas bagaimana meningkatkan mutu pendidikan. pendidikan di Madrasah dengan mengkoordinir setiap kegiatan dengan rekan sejawat dalam rangka mewujudkan mutu pendidikan melalui pengelolaan pembiayaan Pendidikan.²⁵

11. Manajemen Pembiayaan di Sekolah Menengah Pertama Negeri Anjongan

²⁴ Nur Gamar. *Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Study Kasus MTS Darul Khair Masing, Kec. Batui, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah)*. Tadbir. 2019. <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v7i1.1009>

²⁵ Mesiono, Suswanto Suswanto, Rahmat Rifai Lubis, Haidir. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Imam Muslim Serdang Bedagai*. Intiqad. 2021. <http://dx.doi.org/10.30596%2FIntiqad.v13i1.6244>

Jurnal yang diteliti oleh Pratiwing Utami, Chiar dan Sukmawati di Program Studi Administrasi Pendidikan FKIP Untan Pontianak²⁶. Dari hasil penelitian ini, ditekankan bahwa dalam manajemen pembiayaan meliputi beberapa tahapan, yakni a) perencanaan, di SMPN 1 Anjoang, perencanaan dilakukan dengan disusunkannya APBS oleh tim yang sudah ditetapkan serta melibatkan seluruh komponen sekolah, kemudian b) efektifitas pelaksanaan pembiayaan yang melibatkan guru serta komite sekolah, terakhir c) pengawasan pembiayaan dilakukan oleh instansi atau inspektorat dari pusat.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, ditemukan beberapa perbedaan yang tentunya akan berimplikasi pada hasil analisis maupun temuan dilapangan. Perbedaannya antar lain: a) waktu penelitian, yang mana dengan beriringnya perkembangan zaman, tentu ada kebijakan baru ataupun fenomena yang berbeda yang menjadi landasan setiap peneliti. Kemudian b) tempat penelitian, karena sejatinya setiap lembaga pendidikan maupun organisasi akan memiliki budaya kerja yang berbeda sehingga memungkinkan memiliki kebijakan dan pencapaian yang berbeda-beda.

Selanjutnya c) teori yang digunakan dalam penelitian sebelumnya masih menggunakan teori manajemen secara umum, namun dalam penelitian ini peneliti mengkaji teori manajemen, disamping itu peneliti juga tetap menilik teori manajemen pembiayaan serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan manajemen pembiayaan. Terakhir d) yang dapat dijadikan pembeda dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, karena dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrument kunci penelitian, yang tentunya memiliki asa ingin tahu yang berbeda-beda dengan peneliti sebelumnya.

Berdasarkan penelitian yang dipaparkan diatas, maka peneliti menemukan pembahasan yang sama yaitu manajemen pembiayaan yang masih menarik untuk menjadi pembahasan penelitian dan mengungkap dari segi hal yang lain yaitu untuk

²⁶ Pratiwing Utami, Chiar dan Sukmawati. Manajemen Pembiayaan di Sekolah Menengah Pertama Negeri Anjongan. *Jurnal FKIP Untan*. 1.1 (Juni 2014). 23

meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pendidik dan tenaga kependidikan.

G. Definisi Operasional

1. Manajemen

Manajemen secara etimologi berasal dari kata “to manage” yang berarti mengurus, mengatur, mengemudikan, mengendalikan,..menangani, mengelola, menyelenggarakan, menjalankan, melaksanakan dan memimpin. Kata “*management*” berasal dari bahasa latin “*manus*” yang memiliki arti tangan, kemudian “*manus*” dapat pula diartikan bekerja berkali-kali.²⁷ Manajemen adalah proses kerjasama antar individu dalam mencapai tujuan untuk mencapai “tujuan..organisasi..sesuai dengan pelaksanaan fungsi fungsi perencanaan, pengorganisasian,..personalia, pengarahan, kepemimpinan, dan pengawasan”.²⁸ Proses tersebut dapat menentukan pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditentukan..dengan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber sumber daya lainnya untuk mencapai hasil lebih yang efisien dan efektif. Manajemen menurut Malayu S.P Hasibuan mengemukakan bahwa ”manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.”.²⁹ Menurut Henry L Sisk dalam bukunya..“*Principles..of Management*” disebutkan *Management is the coordination of all..resources through the processes..of planning, organizing, directing, and controlling in order to attain stated objectives* artinya manajemen adalah proses pengkoordinasian..seluruh sumber daya melalui perencanaan, pengorganisasian,..pengarahan..dan pengendalian..untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³⁰

²⁷ A Hidayat and I Machal, *Pengelolaan Pendidikan* (Bandung: Educa, 2010), hal.24.

²⁸ Pandi Afandi, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep, Dan Indikator)* (Riau: Zanafa Publishing, 2018), hal.35.

²⁹ Malayu S P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), hal.57.

³⁰ H L Sisk and S Western, *Principles Of Management* (Ohio: Philippine, 1969), hal.33.

2. Manajemen Pendidikan

Muhaimin mendefinisikan manajemen pendidikan Islam adalah “proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya pendidikan Islam untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien.”³¹ Adapun Manajemen Pendidikan Islam adalah proses pemanfaatan semua sumber daya yang dimiliki (dikelola oleh umat Islam, lembaga pendidikan atau nilai-nilai Islam) baik perangkat keras maupun lunak. Pemanfaatan tersebut dilakukan “melalui kerjasama dengan orang lain secara efektif, efisien, dan produktif untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat.”³²

Dapat disimpulkan bahwa Manajemen Pendidikan Islam dapat berupa *Planning, Organizing,..Actuating, dan Controlling* dengan menggunakan pemanfaatan yang Islami sehingga seluruh..potensi yang ada (manusia atau bukan manusia, diri sendiri..dan orang lain) secara..totalitas dalam aktivitas (upaya, lembaga, serta produk)..pendidikan Islam, dimulai dari niat secara Islami dan untuk mencapai tujuan Islami.

3. Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Manajemen Pembiayaan Pendidikan semakna dengan beberapa makna manajemen yang berkaitan dengan pembiayaan atau manajemen pembiayaan diperjelas Marno dan Supriyanto: Manajemen pembiayaan sebagai pengelolaan atas fungsi pembelian, yakni fungsi bagaimana pihak manajemen mampu menghimpun dana (*raising of found*) dan mengalokasikan (*allocation of found*) dana tersebut sehingga tujuan organisasi pendidikan tercapai secara efektif dan efisien.³³ Anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan tujuan pendidikan. Menurut Nanang Fattah, Anggaran penerimaan adalah Pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur.

³¹ Muhaimin, *Manajemen Pendidikan Aplikasinya Dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009),54.

³² Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), 88

³³ Marno and Triyo Supriyanto, *Manajemen Dan Kepemimpinan Pendidikan Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2008),7

Untuk sekolah dasar negeri, umumnya memiliki sumber-sumber anggaran penerimaan, yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, orangtua murid, dan sumber lain. Sedangkan anggaran dasar pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Belanja sekolah sangat ditentukan oleh komponen-komponen yang jumlah dan proporsinya bervariasi di antara sekolah yang satu dan daerah yang lain. Serta dari waktu ke waktu. Berdasarkan pendekatan unsur biaya (ingredient approach), pengeluaran sekolah dapat dikategorikan kedalam beberapa item pengeluaran yaitu: 1) Pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran, 2) Pengeluaran untuk tata usaha sekolah, 3) Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, 4) Kesejahteraan pegawai, 5) Administrasi, 6) Pembinaan teknis education dan 7) Pendataan.³⁴



³⁴ Nanang Fattah, *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 23.